



Analisis Partisipasi Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dalam Program BPJS Ketenagakerjaan

(Studi Kasus pada Kelompok Petani di Kecamatan Tanjung Morawa)

Cahaya Indah Syahfitri ^{1*}, Rahmi Syahriza ², Purnama Ramadani Silalahi ³

¹⁻³ Jurusan Asuransi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : cahayaindahsyahfitri139@gmail.com¹, rahmi.syahriza@uinsu.ac.id², purnamaramadani@uinsu.ac.id³

*Penulis Korespondensi : cahayaindahsyahfitri139@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the participation of non-wage earners (BPU) among oil palm farmers in the BPJS Ketenagakerjaan (Employment Social Security) program in Tanjung Morawa District and to identify the factors influencing their participation decisions. This study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis involving ten informants, consisting of five active participants and five non-participants of BPJS Ketenagakerjaan. Data were analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña interactive model, including data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that participation among oil palm farmers remains uneven. Participation decisions are influenced by limited understanding of the program, perceived benefits of employment social security, unstable income due to the volatility of fresh fruit bunch (FFB) prices and low-yield seasons (musim trek), as well as the role of farmer groups in disseminating information. From the perspective of Islamic economics, the self-contribution mechanism reflects the principles of ta'awun (mutual assistance) and risk sharing in providing social protection for informal workers. This study contributes to a better understanding of participation dynamics among informal agricultural workers and provides recommendations for developing more adaptive strategies to expand BPJS Ketenagakerjaan participation in rural communities.*

Keywords: BPJS Ketenagakerjaan; Islamic Economics; Non-Wage Earners; Oil Palm Farmers; Participation.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat partisipasi pekerja bukan penerima upah (BPU) pada kelompok petani sawit dalam program BPJS Ketenagakerjaan di Kecamatan Tanjung Morawa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan partisipasi mereka. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian berjumlah 10 orang yang terdiri atas lima petani peserta aktif dan lima petani non-peserta BPJS Ketenagakerjaan. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi petani sawit dalam program BPJS Ketenagakerjaan masih belum merata. Keputusan petani untuk berpartisipasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu rendahnya pemahaman terhadap program, persepsi mengenai manfaat jaminan sosial, kondisi ekonomi yang dipengaruhi oleh volatilitas harga tandan buah segar (TBS) dan musim trek, serta peran kelompok tani sebagai media penyebaran informasi. Dari perspektif ekonomi Islam, mekanisme iuran mandiri pada program BPJS Ketenagakerjaan mencerminkan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan *sharing of risk* sebagai bentuk perlindungan sosial berbasis kemaslahatan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami dinamika partisipasi pekerja sektor informal pada masyarakat agraris serta menjadi masukan bagi BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah dalam merumuskan strategi perluasan kepesertaan yang lebih adaptif.

Kata Kunci: BPJS Ketenagakerjaan; Bukan Penerima Upah; Ekonomi Islam; Partisipasi; Petani Sawit.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional di bidang ketenagakerjaan tidak hanya berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga pada penyediaan sistem perlindungan sosial bagi seluruh pekerja. Salah satu bentuk perlindungan tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Program ini bertujuan memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko pekerjaan, seperti kecelakaan kerja, kematian, kehilangan penghasilan, hingga jaminan hari tua. Secara normatif, perlindungan tersebut diberikan kepada seluruh pekerja tanpa membedakan status hubungan kerja, baik pekerja penerima upah maupun pekerja bukan penerima upah (BPU), termasuk petani, nelayan, pedagang, dan pekerja mandiri lainnya (BPJS Ketenagakerjaan, 2022).

Meskipun regulasi telah memberikan hak perlindungan yang bersifat universal, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pekerja sektor informal masih mendominasi struktur ketenagakerjaan nasional dengan proporsi mencapai 59,11% atau sekitar 82,67 juta orang (BPS, 2023). Namun, tingkat kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan pada kelompok pekerja bukan penerima upah masih berada di bawah 15% sehingga sebagian besar pekerja informal belum memperoleh perlindungan sosial yang memadai (BPJS Ketenagakerjaan, 2022). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan perlindungan sosial yang telah dirancang pemerintah dengan realitas implementasinya di lapangan.

Salah satu kelompok pekerja informal yang memiliki tingkat risiko kerja tinggi adalah petani sawit. Aktivitas di perkebunan sawit mengandung berbagai potensi bahaya, seperti tertimpa tandan buah segar (TBS), cedera akibat penggunaan alat panen, tergelincir di lahan yang licin, maupun serangan hewan liar. Selain risiko keselamatan kerja, petani sawit juga menghadapi ketidakpastian ekonomi akibat fluktuasi harga tandan buah segar serta musim trek yang menyebabkan penurunan hasil panen. Kondisi tersebut menjadikan petani sawit sebagai kelompok yang sangat membutuhkan perlindungan sosial melalui program BPJS Ketenagakerjaan (Pratama & Lestari, 2021).

Namun demikian, tingginya tingkat risiko pekerjaan tidak selalu diikuti oleh tingginya tingkat partisipasi dalam program jaminan sosial. Hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di Kecamatan Tanjung Morawa pada awal tahun 2026 menunjukkan bahwa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di kalangan petani sawit masih belum merata. Sebagian besar petani non-peserta memiliki pemahaman yang keliru mengenai program tersebut. Mereka beranggapan bahwa BPJS Ketenagakerjaan hanya diperuntukkan bagi pegawai negeri atau pekerja formal, sementara sebagian lainnya menyamakan BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan sehingga merasa tidak perlu menjadi peserta kembali. Temuan awal tersebut

menunjukkan adanya *asymmetric information* yang memengaruhi keputusan petani dalam mengikuti program jaminan sosial.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi pekerja informal dalam BPJS Ketenagakerjaan dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman terhadap manfaat program, ketidakstabilan pendapatan, serta terbatasnya sosialisasi (Pristanti, Sukidin, & Hartanto, 2022; Aprillia & Lubis, 2023). Selain itu, persepsi terhadap manfaat program dan kemudahan pembayaran iuran juga menjadi faktor penting yang memengaruhi keberlanjutan kepesertaan pekerja bukan penerima upah (Undiksha, 2024). Dengan demikian, faktor ekonomi, informasi, dan persepsi masyarakat menjadi determinan utama dalam meningkatkan partisipasi pekerja sektor informal.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya masih berfokus pada pekerja sektor informal secara umum dan sebagian besar dilakukan pada wilayah perkotaan. Kajian yang secara khusus membahas kelompok petani sawit pada tingkat kecamatan masih sangat terbatas. Padahal, karakteristik petani sawit berbeda dengan kelompok pekerja informal lainnya karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas, musim trek, serta keberadaan kelembagaan lokal seperti kelompok tani yang berpotensi memengaruhi keputusan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, masih terdapat *research gap* mengenai bagaimana faktor sosial, ekonomi, kelembagaan lokal, serta persepsi petani memengaruhi partisipasi pekerja bukan penerima upah pada sektor perkebunan sawit.

Selain *research gap* tersebut, penelitian ini juga memiliki *theoretical gap*. Penelitian mutakhir mengenai perilaku pekerja bukan penerima upah menunjukkan bahwa keputusan untuk berpartisipasi dalam program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya ditentukan oleh adanya risiko pekerjaan, tetapi juga oleh pengetahuan, sikap terhadap program, serta pertimbangan individu dalam mengelola kemampuan dan keputusan kepesertaan (Hartono et al., 2025). Akan tetapi, kondisi di Kecamatan Tanjung Morawa menunjukkan fenomena yang berbeda. Meskipun menyadari bahwa pekerjaan mereka memiliki tingkat risiko tinggi, sebagian petani tetap memilih untuk tidak mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. Keputusan tersebut dipengaruhi oleh persepsi bahwa iuran bulanan merupakan beban pengeluaran yang harus bersaing dengan kebutuhan pokok rumah tangga maupun biaya operasional pertanian. Fenomena ini menunjukkan bahwa keputusan partisipasi tidak hanya dipengaruhi oleh persepsi risiko, tetapi juga oleh kondisi ekonomi rumah tangga, akses informasi, dan lingkungan sosial.

Selanjutnya, penelitian ini memiliki *novelty* dengan menganalisis partisipasi pekerja bukan penerima upah pada kelompok petani sawit melalui pendekatan yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, kelembagaan kelompok tani, serta perspektif ekonomi Islam. Fokus

penelitian tidak hanya mengidentifikasi tingkat partisipasi, tetapi juga menjelaskan dinamika pengambilan keputusan petani dalam mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan pada konteks masyarakat agraris pedesaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat partisipasi pekerja bukan penerima upah (BPU) pada kelompok petani sawit dalam program BPJS Ketenagakerjaan di Kecamatan Tanjung Morawa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan partisipasi mereka. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi BPJS Ketenagakerjaan maupun pemerintah dalam merumuskan strategi perluasan kepesertaan yang lebih adaptif bagi pekerja sektor informal, khususnya masyarakat agraris pedesaan.

2. TINJAUAN TEORITIS

Teori Partisipasi

Teori partisipasi menjelaskan bahwa keterlibatan individu dalam suatu program jaminan sosial tidak hanya sebatas tindakan administratif belaka, melainkan sebuah proses komprehensif yang melibatkan kesadaran, pendaftaran, serta pemenuhan hak dan kewajiban secara berkelanjutan. Dalam ranah jaminan sosial ketenagakerjaan, tingkat keterlibatan pekerja sektor informal sangat ditentukan oleh pemahaman mendalam mengenai manfaat perlindungan serta persepsi mereka terhadap tingkat risiko pekerjaan sehari-hari. Hartono *et al.* (2025) menegaskan bahwa keputusan partisipasi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dalam program BPJS Ketenagakerjaan dipengaruhi secara signifikan oleh variabel pengetahuan dan sikap positif terhadap program. Pengetahuan yang memadai mengenai jenis jaminan dan prosedur klaim membentuk fondasi kepercayaan pekerja informal. Hal ini diperkuat oleh temuan Isaeni *et al.* (2026) yang menunjukkan bahwa pengetahuan, sikap, dan kepercayaan berhubungan positif dengan keputusan pekerja informal untuk mendaftarkan diri secara aktif.

Lebih lanjut, keterlibatan pekerja bukan penerima upah dalam program BPJS Ketenagakerjaan tidak berhenti pada tahap pendaftaran awal, melainkan menuntut konsistensi dalam pembayaran iuran secara mandiri. Syakur (2022) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam sistem perlindungan sosial dipengaruhi oleh interaksi antarfaktor internal dan eksternal, meliputi tingkat literasi, persepsi atas kemanfaatan ekonomi, ketersediaan alokasi finansial rumah tangga, serta pengaruh lingkungan sosial sekitar. Faktor-faktor tersebut menentukan apakah pekerja akan menjadi peserta aktif yang patuh atau justru menjadi *non-peserta* akibat penghentian pembayaran iuran. Dalam kerangka penelitian ini, teori partisipasi digunakan sebagai alat analisis untuk membedah dinamika keterlibatan petani sawit di

Kecamatan Tanjung Morawa. Pendekatan teoritis ini membantu mengevaluasi sejauh mana petani sawit bersedia mengalokasikan sebagian pendapatan mereka untuk jaminan sosial serta faktor-faktor yang mendorong atau menghambat kepatuhan kepesertaan mereka dalam jangka panjang.

Teori Perlindungan Sosial

Teori perlindungan sosial merangkum seperangkat kebijakan publik, instrumen hukum, dan mekanisme kelembagaan yang dirancang khusus untuk melindungi seluruh individu serta rumah tangga dari berbagai guncangan sosial dan ekonomi yang berpotensi menurunkan taraf hidup. Keberadaan jaminan sosial menjadi sangat vital bagi masyarakat yang bekerja pada sektor informal karena mereka kerap menghadapi ketidakpastian pendapatan bulanan serta tingkat kerentanan ekonomi yang sangat tinggi. Prasetyo dan Azizah (2024) menekankan bahwa kelompok pekerja rentan di sektor informal membutuhkan perlindungan sosial dan jaminan sosial yang memadai guna memitigasi berbagai risiko pekerjaan, mengingat akses mereka terhadap jaminan formal masih terbatas. Dalam kerangka ini, perlindungan sosial tidak hanya berorientasi pada penanganan dampak setelah risiko terjadi, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mengurangi kerentanan serta menjaga keberlanjutan kesejahteraan hidup para pekerja dan anggota keluarga mereka secara menyeluruh.

Di Indonesia, penyelenggaraan perlindungan sosial bagi seluruh tenaga kerja diwujudkan secara konkret melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan dioperasikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Lembaga ini menyelenggarakan program perlindungan yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun guna mengantisipasi hilangnya penghasilan akibat risiko kerja (BPJS Ketenagakerjaan, 2022). Dalam konteks penelitian ini, konsep perlindungan sosial dipakai untuk menganalisis urgensi BPJS Ketenagakerjaan sebagai sarana mitigasi risiko bagi petani sawit di Kecamatan Tanjung Morawa. Profesi petani sawit tergolong pekerjaan sektor informal yang memiliki tingkat bahaya fisik cukup tinggi, seperti risiko cedera saat pemanenan dan kecelakaan transportasi. Oleh sebab itu, skema perlindungan sosial menjadi sangat krusial untuk menjaga stabilitas finansial keluarga petani ketika musibah kerja yang tidak terduga terjadi.

Konsep Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU)

Konsep Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) mengacu pada kategori tenaga kerja yang melakukan kegiatan usaha ekonomi secara mandiri guna memperoleh penghasilan tanpa terikat hubungan kerja formal dengan pemberi kerja tertentu. Berdasarkan panduan resmi BPJS Ketenagakerjaan (2022), kelompok BPU mencakup ranah profesi yang sangat beragam di

sektor informal, seperti petani, nelayan, pedagang, pelaku UMKM, serta pekerja lepas mandiri lainnya. Karakteristik utama yang membedakan segmen BPU dari Pekerja Penerima Upah (PU) terletak pada sistem pengikutsertaan dan pembiayaan iuran program jaminan sosial. Apabila pada sektor formal iuran sebagian ditanggung oleh perusahaan pemberi kerja, maka peserta BPU wajib membayar iuran secara swadaya dan mandiri. Implikasinya, keberlanjutan kepesertaan kelompok BPU bergantung sepenuhnya pada komitmen serta kapasitas finansial pribadi dalam mengalokasikan dana iuran secara rutin setiap bulannya demi memperoleh jaminan perlindungan sosial.

Karena skema pembiayaan yang bersifat mandiri, tingkat kepesertaan pekerja BPU sangat dipengaruhi oleh dinamika kondisi ekonomi rumah tangga, persepsi terhadap kemanfaatan program, kemudahan akses pembayaran iuran, serta intensitas kegiatan sosialisasi yang diterima masyarakat (Aprillia & Lubis, 2023; Pristanti *et al.*, 2022). Dalam konteks wilayah Kecamatan Tanjung Morawa, para petani sawit merupakan bentuk nyata dari kelompok pekerja BPU yang menghadapi kerentanan ganda. Usaha pertanian kelapa sawit dicirikan oleh fluktuasi pendapatan akibat tingginya dinamika harga Tandan Buah Segar (TBS) dan fenomena musim trek, di samping memiliki potensi risiko cedera fisik serta kecelakaan kerja yang tergolong tinggi selama proses pemanenan maupun perawatan lahan. Kondisi kerentanan finansial dan fisik inilah yang menjadikan kelompok petani sawit di daerah ini sangat relevan untuk dianalisis secara mendalam dalam penelitian mengenai partisipasi program jaminan sosial ketenagakerjaan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menganalisis secara mendalam fenomena partisipasi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) pada kelompok petani sawit dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Pendekatan ini dipilih guna menggali alasan, persepsi, dan pengalaman mendasar yang melatarbelakangi keputusan petani untuk menjadi peserta maupun *non-peserta* (Sugiyono, 2019). Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada kurun waktu Februari hingga Maret 2026. Penentuan lokasi dilakukan secara *purposive* karena wilayah ini memiliki populasi petani sawit yang sangat besar, namun tingkat kepesertaan jaminan sosialnya belum merata. Subjek penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling* yang melibatkan 10 orang informan petani sawit, yang terbagi secara seimbang menjadi 5 orang petani peserta aktif dan 5 orang petani *non-peserta* agar diperoleh gambaran perbandingan komparatif yang utuh serta komprehensif dalam memahami dinamika partisipasi.

Metode penelitian ini mengumpulkan data primer dan sekunder melalui teknik wawancara mendalam secara semi-terstruktur, observasi langsung di lapangan terhadap aktivitas harian petani, serta studi dokumentasi regulasi dan data kepesertaan. Selanjutnya, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Pada tahap kondensasi, data dari lapangan diseleksi, disederhanakan, dan dikelompokkan sesuai tema utama, kemudian disajikan dalam uraian naratif guna mengidentifikasi pola hubungan antartema. Untuk menjamin keabsahan serta kredibilitas temuan penelitian di lapangan, diterapkan teknik triangulasi sumber dengan cara membandingkan dan mengecek ulang kebenaran informasi antara kelompok petani peserta, petani *non-peserta*, serta dokumen resmi yang diperoleh dari pihak BPJS Ketenagakerjaan guna memastikan keakuratan data secara objektif (Sugiyono, 2019).

4. HASIL PENELITIAN

Tingkat Partisipasi Petani Sawit sebagai Pekerja Bukan Penerima Upah dalam Program BPJS Ketenagakerjaan

Program BPJS Ketenagakerjaan merupakan instrumen perlindungan sosial strategis yang dirancang untuk menjamin keberlanjutan tingkat kesejahteraan para pekerja ketika berhadapan dengan berbagai risiko sosial-ekonomi mendadak, seperti kecelakaan kerja, kematian, maupun penurunan kapasitas fisik saat memasuki usia tidak produktif. Skema perlindungan ini tidak hanya ditujukan bagi sektor formal, melainkan juga mencakup segmen pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), termasuk di antaranya para petani sawit yang tergolong ke dalam sektor informal. Kebijakan perluasan kepesertaan kelompok BPU menjadi pilar utama pemerintah dalam meratakan cakupan jaminan sosial nasional, mengingat karakteristik operasional pekerja sektor informal memiliki tingkat kerentanan ekonomi serta fisik yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja formal (BPJS Ketenagakerjaan, 2022; Hartono *et al.*, 2025). Meskipun demikian, proses integrasi sistem jaminan sosial nasional bagi masyarakat agraris pedesaan secara empiris masih terus menghadapi berbagai tantangan struktural yang relatif cukup kompleks.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi petani sawit di Kecamatan Tanjung Morawa masih berada dalam kategori belum optimal serta mengalami ketimpangan. Dari sepuluh informan yang diwawancarai secara mendalam, lima orang telah terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan lima informan sisanya

tergolong *non-peserta* atau belum mendaftarkan diri. Temuan empiris tersebut mengindikasikan adanya dikotomi partisipasi di tengah masyarakat, di mana terbuka lebar akses kepesertaan resmi bagi pekerja BPU belum secara otomatis mendorong seluruh lapisan petani sawit untuk mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan. Fenomena rendahnya tingkat partisipasi ini sejalan dengan temuan Pristanti *et al.* (2022) serta Arifin dan Alkadafi (2026) yang menjelaskan bahwa tingkat kepesertaan pekerja informal senantiasa dipengaruhi oleh ketidakpastian pendapatan harian, keterbatasan akses terhadap informasi resmi, serta belum meratanya tingkat literasi jaminan sosial pada lingkup komunitas agraris pedesaan.

Petani sawit yang telah terdaftar menjadi peserta aktif umumnya memiliki tingkat kesadaran tinggi akan risiko bahaya fisik dari pekerjaan perkebunan. Proses pemanenan tandan buah segar dengan menggunakan bilah egrek maupun dodos, serta kondisi medan lahan yang licin dan curam, menjadi pertimbangan rasional utama mereka dalam mengamankan perlindungan sosial. Dalam wawancara, Pak Asnawi mengungkapkan: *"Saya ikut BPJS Ketenagakerjaan karena kerja di kebun sawit banyak risikonya. Kalau sampai terjadi kecelakaan saat bekerja atau meninggal dunia, keluarga masih mendapatkan santunan sehingga tidak terlalu terbebani."* Sebaliknya, kelompok petani *non-peserta* belum menganggap program tersebut sebagai sebuah kebutuhan yang mendesak. Dalam wawancara, Pak Hambali menyatakan secara jujur mengenai persepsinya: *"Saya belum ikut karena mengira BPJS Ketenagakerjaan hanya untuk pegawai atau karyawan perusahaan swasta. Saya hanya seorang petani, jadi saya pikir memang tidak bisa ikut."*

Perbedaan pandangan tersebut membuktikan bahwa tingkat partisipasi petani sangat ditentukan oleh kualitas pemahaman masyarakat terhadap kriteria sasaran kepesertaan. Hasil penelitian ini relevan dengan kajian Hartono *et al.* (2025) yang menyimpulkan bahwa pengetahuan mengenai manfaat perlindungan menjadi determinan utama dalam mendorong minat kepesertaan pekerja BPU. Selain itu, temuan ini memperkuat riset Aprillia dan Lubis (2023) bahwa tingkat literasi risiko berbanding lurus dengan kesadaran mendaftar jaminan sosial. Namun demikian, kebaruan dari penelitian ini menunjukkan bahwa di Kecamatan Tanjung Morawa terjadi ketimpangan partisipasi yang nyata di antara para petani sawit, padahal mereka beroperasi pada lingkungan kerja dan tingkat risiko yang relatif sama. Oleh karena itu, skema program perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan membutuhkan adanya strategi sosialisasi lapangan yang jauh lebih komprehensif, edukatif, serta adaptif bagi kultur kehidupan masyarakat agraris pedesaan.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Petani Sawit dalam Program BPJS Ketenagakerjaan

Faktor pertama yang paling dominan dalam memengaruhi partisipasi petani sawit adalah tingkat pemahaman terhadap program BPJS Ketenagakerjaan. Sebagian besar informan *non-peserta* mengalami keterbatasan informasi sehingga berasumsi bahwa jaminan ketenagakerjaan hanya diperuntukkan bagi pekerja formal yang menerima gaji bulanan tetap, atau menyamakannya dengan BPJS Kesehatan. Dalam wawancara, Pak Hambali menyampaikan: *"Saya kira BPJS Ketenagakerjaan hanya untuk orang yang bekerja di perusahaan. Saya sudah punya BPJS Kesehatan, jadi saya pikir tidak perlu lagi ikut BPJS Ketenagakerjaan."* Fenomena *information gap* ini menyebabkan minimnya keyakinan petani untuk bergabung. Temuan empiris ini sangat sejalan dengan riset Hartono *et al.* (2025) serta Isnaeni *et al.* (2026) yang menegaskan secara konsisten bahwa tingkat pengetahuan serta kepercayaan pekerja informal terhadap kemanfaatan jangka panjang program merupakan variabel penentu utama dalam membangun kesadaran mandiri untuk mendaftar sebagai peserta aktif.

Faktor kedua adalah persepsi petani terhadap nilai manfaat dari jaminan sosial ketenagakerjaan. Petani peserta aktif menilai program ini sebagai bentuk proteksi investasi jangka panjang yang mampu memberikan kepastian rasa aman bagi perekonomian keluarga saat berhadapan dengan risiko kecelakaan kerja. Dalam wawancara, Pak Asnawi menceritakan alasan keputusannya: *"Kalau terjadi kecelakaan waktu bekerja, setidaknya keluarga masih mendapat santunan. Itu yang membuat saya tetap ikut BPJS Ketenagakerjaan."* Sebaliknya, kelompok *non-peserta* menganggap manfaat jaminan tersebut belum dapat dirasakan secara langsung sehingga belum menjadi prioritas kebutuhan. Perbedaan cara pandang ini sangat mendukung hasil riset Aprillia dan Lubis (2023) serta Helena (2024) yang menyimpulkan secara mendalam bahwa pembentukan persepsi positif mengenai kegunaan langsung jaminan perlindungan merupakan determinan krusial yang menentukan motivasi utama kepesertaan pekerja BPU dalam ranah informal.

Faktor ketiga yang memengaruhi keputusan partisipasi adalah dinamika kondisi ekonomi rumah tangga petani sawit. Tingkat pendapatan mereka sangat tergantung pada pergerakan harga Tandan Buah Segar (TBS) serta siklus musim trek yang menyebabkan penurunan volume panen secara drastis. Saat pendapatan merosot, alokasi keuangan diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga, biaya pendidikan anak, dan operasional pupuk. Dalam wawancara, Pak Gahar mengungkapkan: *"Kalau harga sawit turun, uangnya lebih dipakai untuk pupuk dan kebutuhan rumah. Kadang iuran BPJS ditunda dulu."*

Temuan empiris ini memperkuat hasil penelitian Aprillia dan Lubis (2023) serta Arifin dan Alkadafi (2026) yang menunjukkan bahwa volatilitas finansial merupakan hambatan utama pekerja informal, di mana kewajiban membayar iuran swadaya secara rutin setiap bulan kerap dipandang sebagai beban pengeluaran tambahan yang memberatkan.

Faktor keempat adalah efektivitas kegiatan sosialisasi serta optimalisasi peran kelompok tani lokal. Petani yang secara rutin menghadiri forum kelompok tani atau mendapatkan edukasi langsung dari BPJS Ketenagakerjaan terbukti memiliki tingkat literasi program yang jauh lebih baik dibandingkan petani yang terisolasi dari informasi resmi. Kelompok tani berfungsi sebagai wadah diskusi, media berbagi pengalaman, serta sarana verifikasi informasi yang efektif dalam membangun rasa percaya masyarakat terhadap sistem jaminan sosial. Temuan ini sangat mendukung kesimpulan Destyawan dan Padmalia (2026) serta Helena (2024) yang menguraikan bahwa strategi komunikasi pemasaran sosial yang kontekstual dan tepat sasaran mampu meningkatkan literasi ketenagakerjaan secara bermakna. Oleh sebab itu, penguatan peran kelembagaan kelompok tani merupakan strategi kunci untuk mengikis mispersepsi dan memperluas cakupan kepesertaan pekerja BPU di pedesaan.

Partisipasi Petani Sawit dalam Program BPJS Ketenagakerjaan Perspektif Ekonomi Islam

Program jaminan sosial memiliki keselarasan substansial dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam, terutama dalam mengupayakan kemaslahatan umum (*maslahah*) serta memberikan perlindungan terhadap keselamatan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam kerangka Ekonomi Islam, mitigasi terhadap risiko sosial-ekonomi tidak hanya dibebankan sebagai tanggung jawab individu semata, melainkan merupakan wujud kewajiban kolektif (*ta'āwun*) untuk saling menanggung beban ketika musibah terjadi. Keikutsertaan petani dalam skema jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dapat dipahami sebagai instrumen ikhtiar yang rasional untuk menjaga keberlanjutan taraf hidup keluarga (Syakur, 2022; Haneef & Furqani, 2021). Melalui iuran yang terhimpun, mekanisme gotong royong terwujud secara nyata untuk menyantuni peserta yang tertimpa musibah. Oleh sebab itu, penyelenggaraan sistem jaminan sosial sangat mendukung pencapaian tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah* dalam mewujudkan kesejahteraan serta perlindungan ekonomi di tengah masyarakat agraris pedesaan.

Hasil penelitian lapangan mengonfirmasi bahwa petani peserta aktif memiliki pemahaman bahwa pendaftaran jaminan sosial merupakan manifestasi tindakan ikhtiar dalam mengantisipasi kecelakaan kerja di perkebunan. Mereka menyadari bahwa mempersiapkan perlindungan finansial tidak meniadakan rasa tawakal kepada Tuhan, melainkan

melengkapinya dengan upaya nyata. Dalam wawancara, Pak Andy menegaskan pandangannya: "*Saya ikut BPJS bukan karena berharap celaka, tetapi supaya kalau terjadi musibah keluarga tidak terlalu susah. Ini bentuk persiapan saja.*" Sikap mental tersebut mencerminkan kaidah fikih tentang pencegahan kemudaratan (*daf' al-mafāsīd*) dan penarikan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) (Auda, 2021; Syakur, 2022). Dengan demikian, keputusan keikutsertaan petani dalam program BPJS Ketenagakerjaan memuat nilai keagamaan yang sangat sejalan dengan ajaran keislaman dalam menjaga stabilitas serta ketahanan ekonomi keluarga dari guncangan risiko yang tidak terduga.

Sebaliknya, pada kelompok petani *non-peserta*, keputusan untuk tidak bergabung dipengaruhi oleh dominasi pertimbangan ekonomi jangka pendek serta belum optimalnya kesadaran manajemen risiko. Ketidakstabilan harga Tandan Buah Segar (TBS) dan fenomena musim trek mendorong petani memprioritaskan pemenuhan kebutuhan konsumsi harian ketimbang mengalokasikan dana iuran jaminan sosial. Dalam perspektif Ekonomi Islam, pola konsumsi dan pengelolaan harta seharusnya mengintegrasikan prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*) serta perlindungan masa depan keluarga agar tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan rentan secara ekonomi (Dusuki, 2021). Hambatan partisipasi ini menunjukkan pentingnya intervensi edukasi Ekonomi Islam yang menekankan bahwa pembayaran iuran jaminan sosial bukanlah sebuah beban pemborosan dana, melainkan instrumen tabungan perlindungan yang sangat sah secara syariah demi menjamin kebaikan dan keberlanjutan hidup anggota keluarga.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini selaras dengan pemikiran Syakur (2022) yang menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan merupakan manifestasi konkret dari prinsip *ta'āwun*, di mana masyarakat saling menanggung risiko melalui skema dana *tabarru'* yang dikelola secara amanah. Pandangan ini juga didukung oleh Haneef dan Furqani (2021) yang menyatakan bahwa jaminan sosial merupakan instrumen pembangunan inklusif untuk mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Oleh sebab itu, pendekatan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat petani sawit di Kecamatan Tanjung Morawa akan jauh lebih efektif jika mengintegrasikan pendekatan berbasis nilai-nilai keislaman secara persuasif. Dengan menyelaraskan pemahaman akademis, kebutuhan ekonomi realistis, serta nilai spiritual keagamaan, para petani sawit dapat terdorong secara mandiri untuk berpartisipasi aktif demi mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) serta ketahanan sosial keluarga secara berkelanjutan.

Pembahasan Penelitian

Tingkat Partisipasi Petani Sawit sebagai Pekerja Bukan Penerima Upah dalam Program BPJS Ketenagakerjaan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi petani sawit sebagai pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dalam program BPJS Ketenagakerjaan di Kecamatan Tanjung Morawa tergolong masih rendah dan belum merata. Kondisi ini tercermin dari dikotomi kepesertaan, di mana dari sepuluh informan petani sawit yang diteliti, hanya lima puluh persen yang terdaftar sebagai peserta aktif, sedangkan lima puluh persen sisanya tergolong *non-peserta* atau tidak melanjutkan kepesertaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kepesertaan pekerja informal dalam jaminan sosial dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi dan kemampuan dalam memenuhi iuran. Purba dan Rajagukguk (2025) menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap partisipasi pekerja informal dalam jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia, sementara kelompok dengan kerentanan ekonomi tinggi memiliki peluang kepesertaan lebih rendah. Selain itu, Rahmawati dan Istiqomah (2024) menunjukkan bahwa keikutsertaan pekerja sektor informal berkaitan dengan karakteristik pekerja, jumlah tanggungan keluarga, dan persepsi terhadap risiko pekerjaan.

Dalam praktik di lapangan, tingkat partisipasi yang tidak merata ini dipicu oleh tingginya angka penunggakan iuran saat terjadi musim trek atau penurunan hasil panen kelapa sawit. Petani peserta aktif menyiasati dinamika finansial ini melalui mekanisme pembayaran di muka atau pembayaran beberapa bulan sekaligus pada saat kondisi pendapatan memungkinkan, sementara kelompok petani *non-peserta* memilih tidak melanjutkan kepesertaan karena menganggap iuran sebagai pengeluaran yang harus bersaing langsung dengan kebutuhan pokok rumah tangga serta biaya operasional kebun. Temuan ini memperlihatkan bahwa bagi pekerja sektor informal dengan pendapatan yang fluktuatif, keputusan mempertahankan kepesertaan sangat berkaitan erat dengan kapasitas ekonomi serta prioritas pengeluaran rumah tangga. Kondisi tersebut selaras dengan temuan penelitian Purba dan Rajagukguk (2025) mengenai rendahnya partisipasi jaminan sosial pada kelompok pekerja sektor informal yang memiliki kerentanan ekonomi cukup tinggi.

Apabila dikomparasikan dengan tiga peneliti terdahulu, gambaran tingkat partisipasi dalam penelitian ini memberikan analisis komparatif yang tajam sekaligus menghadirkan kebaruan (*novelty*). Hasil riset ini sejalan dengan temuan Aprillia dan Lubis (2023) yang mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi petani di sektor agraris masih tergolong minim akibat belum meratanya literasi jaminan sosial. Penelitian ini juga memperkuat analisis Pristanti, Sukidin, dan Hartanto (2022) yang menemukan bahwa angka kepesertaan pekerja

informal di pedesaan cenderung fluktuatif dan sangat rentan terhadap kepastian pendapatan. Namun demikian, berbeda dari penelitian kuantitatif Undiksha (2024) yang mengukur partisipasi melalui indikator kepuasan layanan pada peserta terdaftar, penelitian kualitatif ini memberi sumbangan kebaruan dengan menguraikan dinamika partisipasi secara utuh dari dua sisi, baik kelompok peserta aktif yang memanfaatkan saluran digital maupun kelompok *non-peserta* yang terhambat oleh mispersepsi fungsi jaminan sosial.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Petani Sawit dalam Program BPJS Ketenagakerjaan

Temuan penelitian mengidentifikasi empat faktor utama penentu keputusan partisipasi petani sawit BPU, yaitu tingkat pemahaman program, kondisi ekonomi rumah tangga, pengalaman guncangan risiko, serta efektivitas kelembagaan kelompok tani. Dari sisi teori, temuan ini menunjukkan bahwa keputusan partisipasi pekerja bukan penerima upah tidak hanya ditentukan oleh persepsi terhadap risiko pekerjaan, tetapi juga oleh pengetahuan, sikap terhadap manfaat program, pengaruh lingkungan sosial, serta kemampuan individu dalam mempertimbangkan kondisi ekonomi ketika mengambil keputusan kepesertaan. Perspektif tersebut sejalan dengan Hartono *et al.* (2025) yang menjelaskan perilaku pekerja bukan penerima upah dalam mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan melalui keterkaitan antara sikap, pengetahuan, pengaruh sosial, dan pertimbangan kemampuan individu. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman program berkaitan dengan pengetahuan, guncangan risiko berkaitan dengan sikap perlindungan sosial, peran kelompok tani mencerminkan pengaruh lingkungan, sedangkan kondisi ekonomi berkaitan dengan kemampuan petani mempertahankan kepesertaan.

Dalam praktik di lapangan, volatilitas pendapatan akibat fluktuasi harga tandan buah segar diasiasi oleh kelompok petani peserta aktif melalui strategi pembayaran iuran di muka atau pembayaran beberapa bulan sekaligus ketika kondisi keuangan memungkinkan guna menghindari penunggakan saat terjadi penurunan hasil panen. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Aprillia dan Lubis (2023) mengenai faktor dominan literasi program terhadap kesadaran membayar iuran, namun melengkapinya dengan temuan faktor penjelas spesifik berupa strategi finansial pra-bayar tersebut. Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian Pristanti, Sukidin, dan Hartanto (2022) mengenai hambatan pendapatan tidak tetap pada sektor informal. Selain itu, temuan Isnaeni *et al.* (2026) menunjukkan bahwa pengetahuan dan keyakinan pekerja informal memiliki hubungan signifikan dengan keputusan kepesertaan jaminan sosial, sehingga semakin memperkuat temuan penelitian ini mengenai pentingnya pemahaman program dalam membentuk keputusan petani.

Penelitian ini sekaligus memberikan sumbangan kebaruan (*novelty*) akademis dengan membuktikan bahwa kelembagaan kelompok tani lokal dapat berperan sebagai jembatan sosial yang sangat efektif untuk menutupi keterbatasan edukasi resmi dari institusi penyelenggara jaminan sosial. Melalui wadah kelompok tani, proses penyebaran informasi, diskusi antarpetani, dan penguatan pemahaman mengenai jaminan sosial dapat berlangsung secara jauh lebih intensif serta persuasif di tingkat masyarakat agraris pedesaan. Kelembagaan lokal ini terbukti mampu mengikis mispersepsi masyarakat serta membangun kepercayaan terhadap sistem perlindungan sosial nasional. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan kelompok tani sebagai agen sosialisasi informal menjadi strategi kunci dalam meningkatkan partisipasi berkelanjutan pekerja bukan penerima upah. Interaksi dinamis antara faktor pengetahuan, kondisi ekonomi, dan kelembagaan lokal inilah yang menentukan keberhasilan perluasan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kecamatan Tanjung Morawa secara optimal dan merata.

Partisipasi Petani Sawit dalam Program BPJS Ketenagakerjaan Perspektif Ekonomi Islam

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi petani sawit sebagai pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dalam program BPJS Ketenagakerjaan di Kecamatan Tanjung Morawa masih tergolong belum optimal dan mengalami ketimpangan nyata antara kelompok peserta aktif dan *non-peserta*. Dari sudut pandang teori, fenomena ini mengonfirmasi Teori Partisipasi Hartono *et al.* (2025) serta konsep jaminan sosial dalam perspektif Ekonomi Islam yang menempatkan perlindungan sosial sebagai bagian penting dari upaya menjaga kesejahteraan serta mengurangi kerentanan masyarakat (Haneef & Furqani, 2021). Partisipasi tidak hanya dipahami sebagai keterlibatan administratif, melainkan kesadaran untuk terlibat dalam mekanisme perlindungan risiko yang mengganggu keberlangsungan ekonomi keluarga. Dalam praktik lapangan, hambatan utama timbul akibat fenomena *asymmetric information*, di mana kelompok *non-peserta* menyamakan BPJS Ketenagakerjaan dengan KIS/BPJS Kesehatan dan menganggap kepemilikan kartu kesehatan sudah cukup memadai bagi kebutuhan keluarga.

Secara etis dan normatif, partisipasi petani peserta aktif dapat dipahami melalui nilai Ekonomi Islam berupa prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan ikhtiar nyata dalam menghadapi berbagai risiko kehidupan. Mekanisme jaminan sosial melalui penghimpunan iuran swadaya dan pemberian manfaat kepada peserta yang mengalami musibah mencerminkan semangat saling membantu dan perlindungan bersama sebagaimana dijelaskan oleh Syakur (2022). Sebaliknya, pada kelompok *non-peserta*, keputusan tidak bergabung dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi jangka pendek serta belum optimalnya kesadaran manajemen risiko.

Ketidakstabilan harga tandan buah segar dan fenomena musim trek mendorong petani memprioritaskan konsumsi harian ketimbang mengalokasikan dana perlindungan. Dalam perspektif Ekonomi Islam, pengelolaan harta seharusnya mengintegrasikan prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*) serta perlindungan masa depan keluarga agar tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah secara ekonomi (Dusuki, 2021). Oleh karena itu, edukasi jaminan sosial penting diselaraskan dengan pemahaman finansial syariah.

Komparasi dengan penelitian terdahulu memperjelas posisi dan kebaruan (*novelty*) analisis partisipasi dalam riset ini. Hasil penelitian ini sejalan dengan Syakur (2022) serta Haneef dan Furqani (2021) yang memandang perlindungan sosial sebagai instrumen untuk menjaga kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kerentanan sosial-ekonomi. Selanjutnya, Auda (2021) memberikan landasan bahwa perlindungan terhadap jiwa dan harta merupakan bagian utama dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, sehingga kepesertaan jaminan sosial dipahami sebagai ikhtiar menjaga keselamatan jiwa (*hifẓ al-nafs*) dan keberlangsungan harta (*hifẓ al-māl*). Berbeda dengan penelitian terdahulu yang berfokus pada aspek normatif, penelitian kualitatif ini memberikan nilai tambah kebaruan dengan menunjukkan bagaimana nilai *ta'awun* berhadapan langsung dengan realitas mispersepsi petani mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian temuan empiris partisipasi petani sawit dengan nilai-nilai Ekonomi Islam secara holistik dalam menjelaskan pentingnya jaminan sosial bagi pekerja bukan penerima upah.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi pekerja bukan penerima upah (BPU) pada kelompok petani sawit di Kecamatan Tanjung Morawa dalam program BPJS Ketenagakerjaan masih belum optimal. Dari sepuluh informan yang diteliti, lima orang telah menjadi peserta aktif, sedangkan lima lainnya belum berpartisipasi. Rendahnya tingkat kepesertaan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu rendahnya pemahaman mengenai program, persepsi terhadap manfaat jaminan sosial, kondisi ekonomi akibat perubahan harga tandan buah segar (TBS) dan musim trek, pengalaman menghadapi risiko kerja, serta peran kelompok tani dalam proses edukasi dan pendampingan.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa literasi jaminan sosial menjadi faktor yang paling dominan dalam membentuk keputusan petani untuk berpartisipasi. Sebagian petani masih memiliki persepsi bahwa BPJS Ketenagakerjaan hanya diperuntukkan bagi pekerja formal atau memiliki fungsi yang sama dengan BPJS Kesehatan. Sebaliknya, petani yang pernah mengalami kecelakaan kerja atau menerima manfaat klaim cenderung memiliki

kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya perlindungan sosial. Selain itu, kelompok tani terbukti berperan sebagai media yang efektif dalam penyebaran informasi, pendampingan administrasi, dan peningkatan kepercayaan petani terhadap program BPJS Ketenagakerjaan.

Dari perspektif ekonomi Islam, partisipasi petani dalam program BPJS Ketenagakerjaan mencerminkan implementasi nilai *ta'āwun*, *masalahah*, dan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai upaya menjaga keselamatan jiwa dan keberlangsungan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, peningkatan kepesertaan pekerja sektor informal perlu didukung melalui penguatan literasi jaminan sosial, optimalisasi peran kelompok tani sebagai mitra sosialisasi, serta penyusunan mekanisme pelayanan dan pembayaran iuran yang lebih adaptif sesuai karakteristik masyarakat agraris pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprillia, N., & Lubis, F. A. (2023). Analisis BPJS Ketenagakerjaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja khususnya petani di Bangun Purba. *Jurnal Mirai Management*, 8(2), 326–333.
- Arifin, J., & Alkadafi, M. (2026). Implementation of social security for workers in the informal sector: A study of Bukan Penerima Upah (BPU) at BPJS Ketenagakerjaan Duri. *Journal of Social and Policy Issues*. <https://doi.org/10.58835/jspi.v6i1.578>
- Auda, J. (2021). *Maqasid Al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach* (Updated ed.). The International Institute of Islamic Thought.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Keadaan ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2023*. Badan Pusat Statistik.
- BPJS Ketenagakerjaan. (2022). *Panduan kepesertaan pekerja bukan penerima upah (BPU)*. BPJS Ketenagakerjaan.
- Destyawan, R., & Padmalia, M. (2026). Peran literasi ketenagakerjaan dalam memperkuat pengaruh kepercayaan dan reputasi merek terhadap minat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja sektor informal. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.260>
- Dusuki, A. W. (2021). *Principles and application of Islamic risk management*. Islamic Research and Training Institute.
- Haneef, M. A., & Furqani, H. (2021). *Islamic economics: Principles and analysis*. Routledge.
- Hartono, S., Hanan, S., & Purwanto, A. H. D. (2025). Understanding non-wage workers behavior towards BPJS employment programs: A boundedly rational planned behavior analysis. *Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship*, 11(1), 157. <https://doi.org/10.17358/ijbe.11.1.157>
- Helena, S. (2024). Strategi komunikasi pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekanbaru Kota dalam meningkatkan keikutsertaan pekerja BPU. *Jurnal Komunikasi Pemasaran dan Manajemen*, 11(1), 75–88.
- Hidayat, R., & Nurhayati, S. (2020). Partisipasi pekerja sektor informal dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 115–128.

- Isnaeni, L. M. A., Alayyannur, P. A., & Prasetyawati. (2026). Determinants of employment social security participation among informal workers: Evidence from a cross-sectional study in Riau. *Journal of Vocational, Informatics and Computer Education*, 4(1), 259–268. <https://doi.org/10.66053/voice.v4i1.599>
- Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(1), 67–80.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Prasetyo, K. C., & Azizah, F. (2024). Mewujudkan decent work: Menyorot perlindungan sosial untuk pekerja rumah tangga di Indonesia dengan praktik baik dari Brasil dan Italia. *Jurnal Jamsostek*, 2(2), 141–162. <https://doi.org/10.61626/jamsostek.v2i2.60>
- Pratama, D., & Lestari, R. (2021). Perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal di Indonesia.
- Pristanti, S. N., Sukidin, S., & Hartanto, W. (2022). Implementasi program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada pekerja informal (Studi kasus di Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember). *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 16(2), 297–308. <https://doi.org/10.19184/jpe.v16i2.34275>
- Purba, Y. A., & Rajagukguk, Z. (2025). Increasing labor social security membership for informal workers in Indonesia. *Cogent Social Sciences*. <https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2534139>
- Rahmawati, D. A., & Istiqomah, N. (2024). Determinan keikutsertaan pekerja sektor informal pada BPJS Ketenagakerjaan di Surakarta tahun 2023. *Journal of Policy*, 14(1). <https://doi.org/10.20961/policy.v14i1.1266>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Syakur, A. (2022). Makna jaminan sosial bagi masyarakat sadar BPJS Ketenagakerjaan: Perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 160–175.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Undiksha. (2024). Pengaruh kualitas pelayanan dan persepsi harga pada segmen BPU (Bukan Penerima Upah) terhadap kepuasan peserta BPJS Ketenagakerjaan. *BISMA: Jurnal Manajemen*, 10(2), 889–896.